



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Faktor-Faktor yang Mendorong Tuntutan Kemerdekaan
Catalonia Pada Tahun 2017**

Skripsi

Oleh

Tiara Noor Osniarni

2016330104

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Faktor-Faktor yang Mendorong Tuntutan Kemerdekaan
Catalonia Pada Tahun 2017**

Skripsi

Oleh

Tiara Noor Osniarni

2016330104

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Tiara Noor Osniarni
Nomor Pokok : 2016330104
Judul : Faktor-Faktor yang Mendorong Tuntutan Kemerdekaan Catalonia
Pada Tahun 2017

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 13 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si : 

Sekretaris

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D : 

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA : 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Noor Osniarni

NPM : 2016330104

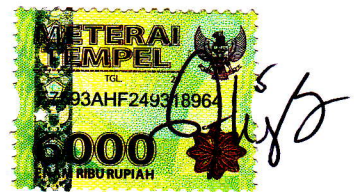
Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Faktor-Faktor yang Mendorong Tuntutan Kemerdekaan Catalonia
Pada Tahun 2017

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 1 Juli 2020



Tiara Noor Osniarni

ABSTRAK

Nama : Tiara Noor Osniarni
NPM : 2016330104
Judul : Faktor-Faktor yang Mendorong Tuntutan Kemerdekaan Catalonia Pada Tahun 2017

Pemberian otonomi menjadi salah satu skema populer untuk menyelesaikan konflik etno-nasionalis dan pemisahan diri. Namun skema ini nampaknya tidak bekerja dengan baik untuk Catalonia. Setelah diberikan status otonomi pada tahun 1979, Catalonia menuntut untuk melakukan penentuan nasib sendiri. Peristiwa ini kemudian memunculkan pertanyaan penelitian “**Mengapa Catalonia menuntut kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 2017?**”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan teori resolusi konflik dari Peter Wallensteen dan konsepsi otonomi sebagai sumber konflik dari Svante E. Cornell.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Catalonia menuntut kemerdekaan dari Spanyol karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka, yaitu diakui sebagai sebuah bangsa di dalam negara Spanyol. Selain itu, otonomi yang diberikan kepada Catalonia justru meningkatkan tuntutan kemerdekaan dengan memunculkan enam buah faktor. Pertama, status otonomi memberikan batas wilayah yang jelas sehingga mudah bagi Catalonia untuk melakukan klaim atas wilayahnya. Kedua, status otonomi memberikan peluang untuk mempertahankan, mempromosikan dan meningkatkan identitas budayanya. Ketiga, status otonomi membentuk *Generalitat* sebagai perwakilan sah masyarakat Catalonia yang dapat menentang keputusan pemerintah pusat dan meningkatkan tuntutan wilayahnya. Keempat, dengan adanya status otonomi maka ada pemimpin yang mengupayakan tercapainya kepentingan Catalonia dan memimpin mobilisasi masyarakatnya. Kelima, status otonomi memberikan kemampuan bagi *Generalitat* untuk mengontrol media massa di wilayahnya dan memasukkan narasi kemerdekaan. Terakhir, dengan adanya otonomi maka *Generalitat* dapat mempromosikan keinginannya untuk merdeka ditingkat internasional sehingga Catalonia berhasil mendapatkan sejumlah dukungan eksternal.

Kata kunci: Catalonia, Spanyol, Identitas, Kemerdekaan, Hak Otonomi

ABSTRACT

Name : Tiara Noor Osniarni
NPM : 2016330104
Title : Factors That Motivates Catalonia's Demands for
Independence in 2017

Granting the right of autonomy is one of the popular schemes to resolving ethno-nationalist conflicts and secession. But this scheme does not seem work well for Catalonia. Even after being granted autonomy status in 1979, Catalonia seeks for self-determination from Spain. From this phenomenon, the research question was made as **“Why Catalonia demands for independence from Spain in 2017?”**. To answer this question, author used conflict resolution theory from Peter Wallensteen and a concept of autonomy as a source of conflict from Svante E. Cornell.

The results showed that Catalonia demanded independence from Spain because their basic needs were not met, that is, recognized as a nation within Spanish state. Furthermore, the autonomy granted to Catalonia increased demands for independence by create six factors. First, it provided a clears borders, so it was easy for Catalonia to make a claim on its territory. Second, it provided opportunities to maintain, promote and enhance their cultural identity. Third, the autonomy formed the *Generalitat* as legitimate representatives of Catalonia's people and decision makers. The *Generalitat* able to oppose the decisions of the central government and increase their own demand. Fourth, with the status of autonomy there is a leader who strives to achieve the interest of Catalonia and leads the mobilization of its society. Fifth, it provided the ability of *Generalitat* to control the mass media in its territory and put an independence narrative through it. Lastly, the status of autonomy gave *Generalitat* an ability to promote their desire to be independence at the international level so Catalonia can obtain external supports.

Keywords: Catalonia, Spain, Identity, Independence, the Right of Autonomy

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mendorong Tuntutan Kemerdekaan Catalonia Pada Tahun 2017” ini dengan baik dan tepat waktu. Penelitian ini dilakukan dan diselesaikan sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar akademik Strata-1 (S1) di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dalam proses penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan, argumen, maupun analisis yang penulis paparkan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, baik mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat umum serta berdampak bagi penelitian lebih lanjut.

Bandung, 1 Juli 2020

Tiara Noor Osniarni

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR AKRONIM	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Pembatasan Masalah	5
1.2.2 Pertanyaan Penelitian	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Kajian Pustaka	6
1.5 Kerangka Pemikiran	10
1.6 Metode Penelitian	18
1.6.1 Jenis Penelitian	19
1.6.2 Pengumpulan Data	19
1.7 Sistematika Pembahasan	20

BAB II STATUTA OTONOMI TAHUN 1979 DAN PENINGKATAN KONFLIK KEMERDEKAAN DI ANTARA CATALONIA DAN SPANYOL	21
2.1 Statuta Otonomi Tahun 1979 sebagai Upaya Resolusi Konflik	22
2.1.1 Kesepakatan di Antara Pemerintah Spanyol dan Catalonia	22
2.1.2. Dukungan Publik terhadap Konstitusi dan Statuta Otonomi	27
2.1.3 Tidak Terakomodasinya Tuntutan Sebagai Sebuah Bangsa di Dalam Negara Spanyol	32
2.2 Amandemen Statuta Pada Tahun 2006 dan Dinamika Konflik Catalonia dan Spanyol Tahun 1979 – 2017	34
2.2.1 Amandemen Statuta Otonomi di Tahun 2006	34
2.2.2 Penentangan dari <i>Partido Popular</i> (PP)	38
2.2.3 Penolakan dari Mahkamah Konstitusi	40
2.2.4 Referendum Kemerdekaan dan Deklarasi Kemerdekaan Tahun 2017	41
BAB III STATUS OTONOMI MENINGKATKAN TUNTUTAN KEMERDEKAAN CATALONIA DARI SPANYOL	44
3.1. Status Otonomi Mempertegas Batas-Batas Wilayah Catalonia	45
3.2 Status Otonomi Memberi Peluang Bagi Perkembangan Bahasa Catalonia	51
3.3 Status Otonomi Memberi Kemampuan untuk Membentuk <i>Generalitat</i>	60
3.4 Status Otonomi Melahirkan Kepemimpinan	72
3.5 Status Otonomi Memberi <i>Generalitat</i> Kemampuan untuk Mengontrol Media Massa	87

3.6 Status Otonomi Memberi Kesempatan Bagi Catalonia untuk Mendapatkan Dukungan Eksternal	94
BAB IV KESIMPULAN	111
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Teori Otonomi Sebagai Sumber Konflik	14
Gambar 3.1 Peta Wilayah Catalonia tahun 2018	47
Gambar 3.2 Peta Wilayah Països Catalans	48
Gambar 3.3 Poster Kemerdekaan Catalonia	50
Gambar 3.4 Rasa Keterkaitan Terhadap Catalonia dan Spanyol	59
Gambar 3.5 Surat Suara Referendum Catalonia 1 Oktober 2017	85
Gambar 3.6 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Catalonia Terhadap Institusi.....	93
Gambar 3.7 Sejumlah Tokoh yang Memberikan Dukungannya Pada Tahun 2014	105
Gambar 3.8 Sejumlah Tokoh yang Memberikan Dukungannya Pada Tahun 2017	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Referendum Reformasi Politik Tahun 1976 di Catalonia	29
Tabel 2.2 Hasil Referendum Konstitusi 1978 di Catalonia	30
Tabel 2.3 Hasil Referendum Statuta Catalonia 1979	31
Tabel 3.1 Pengetahuan Bahasa Catalan	55
Tabel 3.2 Bahasa yang Digunakan Oleh Populasi Catalonia.....	57

DAFTAR AKRONIM

ACN	: <i>Agència Catalana de Notícies</i>
AMI	: <i>Association of Municipalities for Independence</i>
ANC	: <i>Assemblea Nacional Catalana</i>
CCMA	: <i>Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals</i>
CEO	: <i>Centre d'Estudis d'Opinio</i>
CiU	: <i>Convergència i Unió</i>
CUP	: <i>Candidatura d'Unitat Popular</i>
DIPLOCAT	: <i>Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya</i>
ERC	: <i>Esquerra Republicana de Catalunya</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
ICV-EUiA	: <i>Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa</i>
JxS	: <i>Junts pel Sí</i>
MK	: <i>Mahkamah Konstitusi</i>
OHCHR	: <i>United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
PP	: <i>Partido Popular</i>
PPC	: <i>Partit Popular de Catalunya</i>
PSC-PSOE	: <i>Partit dels Socialistes de Catalunya</i>
PSOE	: <i>Partido Socialista Obrero Español</i>
SAC	: <i>Statute of Autonomy of Catalonia</i>
TPS	: <i>Tempat Pemungutan Suara</i>
TVC	: <i>Televisió de Catalunya</i>

UN NGLS	: <i>United Nations Non-Governmental Liaison Service</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UNRWA	: <i>United Nations Relief and Worked Agency for Palestine Refugess in the Near East</i>
UNWFP	: <i>United Nations World Food Programme</i>
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi menjadi salah satu skema yang populer untuk menyelesaikan konflik etno-nasionalis dan pemisahan diri. Benedicto Bacani percaya bahwa otonomi menjadi satu-satunya kompromi yang dapat menjembatani tuntutan minoritas untuk kemerdekaan dan penegasan kedaulatan negara dan integritas wilayah.¹ Ted Robert Gurr juga turut berargumen bahwa otonomi daerah yang dinegosiasikan telah terbukti sebagai upaya yang efektif untuk mencegah upaya etno-nasional memisahkan diri di negara-negara Barat dan Dunia Ketiga.²

Otonomi secara definisi merupakan hak yang memperbolehkan etnik atau kelompok lainnya dengan identitas yang berbeda untuk melakukan kontrol langsung atas kelompok mereka dan memungkinkan negara menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan bersama.³ Pemberian otonomi untuk mengakhiri

¹ Benedicto Bacani, "Autonomy and Peace: Lessons from the Southern Philippines," *United States Institute of Peace*, diakses pada 24 Januari 2020, <https://www.usip.org/events/autonomy-and-peace-lessons-southern-philippines>.

² Ted Robert Gurr, "Peoples against States: Ethnopolitical Conflict and the Changing World System," *International Studies Quarterly*, vol. 38: 366. doi: 10.2307/2600737.

³ Yash Ghai, "Autonomy as a Strategy for Diffusing Conflict," dalam *International Conflict Resolution After the Cold War*, (Washington, DC: The National Academic Press, 2000). doi: 10.17226/9897.

konflik kemerdekaan dilakukan oleh Indonesia kepada Aceh. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Aceh, hak otonomi Aceh memperbolehkan pemerintah Aceh untuk mengontrol seluruh bidang pemerintah kecuali pertahanan, hubungan luar negeri, dan kebijakan fiskal. Hal ini juga memungkinkan Aceh untuk mendapatkan 70 persen dari sumber daya alamnya dan memungkinkan Aceh untuk mengajukan kandidat independen untuk pemilihan gubernur provinsi serta mendirikan partai politik lokal.⁴ Melalui negosiasi otonomi ini, konflik kemerdekaan dapat diakhiri dan membangun kerja sama di antara pemerintah daerah Aceh dan pemerintah Indonesia dalam membangun kembali Aceh yang terkena bencana tsunami di tahun 2004.⁵

Pemberian otonomi untuk mengakhiri konflik kemerdekaan juga dilakukan oleh Rusia kepada Chechnya di tahun 2003. Sebelumnya Chechnya menikmati kemerdekaan secara *de facto* setelah Perang Chechen Pertama di tahun 1994-1996 hingga akhirnya Perdana Menteri Vladimir Putin berusaha menyatukan kembali wilayah Chechnya ke Rusia ditahun 1999.⁶ Finlandia juga memberikan otonomi kepada Kepulauan Åland di tahun 1920 sebagai upaya penyelesaian konflik di mana Kepulauan Åland menuntut hak penentuan nasib sendiri agar dapat menjadi bagian dari Swedia.⁷ Sementara itu, Spanyol memberikan otonomi kepada Catalonia pada tahun 1979 setelah Spanyol melakukan transisi ke demokrasi.

⁴ John Aglionby, "Peace deal to give Aceh autonomy," *The Guardian*, diakses 24 Januari 2020, <https://www.theguardian.com/world/2006/jul/10/indonesia.johnaglionby>.

⁵ Vincent Guarend dan Francisco Fontan, "Ten years of peace in Aceh," *The Jakarta Post*, diakses pada 24 Januari 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2015/11/14/ten-years-peace-aceh.html>.

⁶ Luke Harding, "Russia ends anti-terrorism operations in Chechnya," *The Guardian*, diakses pada 20 Mei 2020, <https://www.theguardian.com/world/2009/apr/16/russia-chechnya-anti-terrorism>.

⁷ Sia Spiliopoulou Åkermark, "Åland Islands," *Autonomy Arrangements in the World* (2019): 3-7.

Catalonia kembali mendapatkan otonominya setelah kurang lebih selama 40 tahun mengalami represi budaya, bahasa, dan pemerintahan di bawah kediktatoran Francisco Franco.

1.2 Identifikasi Masalah

Namun nampaknya pemberian otonomi tidak selalu berhasil dalam menyelesaikan konflik pemisahan diri. Wilayah-wilayah yang telah mendapatkan otonomi justru menuntut untuk memperluas haknya atau bahkan berusaha memisahkan diri dari negara bersangkutan. Wilayah-wilayah dengan otonomi juga melakukan referendum untuk menentukan nasibnya.

Saat ini di Eropa diketahui terdapat lebih dari 100 kelompok otonomi dengan berbagai tingkat otonomi. Catalonia, Skotlandia, dan Flandia adalah beberapa contohnya. Dengan adanya upaya pemisahan diri yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki otonomi ini menjadi ancaman terhadap integritas Eropa. Keluhan terhadap apa yang terjadi di masa lalu, heterogenitas budaya, dan ketegangan politik mendasari gerakan pemisahan diri ini.⁸

Catalonia merupakan salah satu wilayah yang termasuk ke dalam komunitas otonom di Spanyol. Semenjak unifikasi di Semenanjung Iberia lima abad yang lalu, Catalonia telah berulang kali berusaha melepaskan dirinya dari Spanyol. Ketika Spanyol menjadi republik di tahun 1931, Catalonia diberikan

⁸ Edoardo Campanella, "Europe Fracturing From Within: Why Integration Makes Secession More Appealing," *Foreign Affairs*, diakses pada 24 Januari 2020, <https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2017-01-17/europe-fracturing-within>.

status semi-otonomi. Namun di bawah kediktatoran Francisco Franco, status otonomi tersebut dicabut dan adanya pelarangan terhadap bahasa dan kebudayaan Catalonia. Setelah kematian Franco pada 1975, Catalonia mendapatkan kembali kebebasannya dan empat tahun kemudian menjadi wilayah otonomi di Spanyol dengan parlemen, pemerintahan, bendera, dan lagu kebangsaannya sendiri.⁹

Di tahun 2010, pengadilan Spanyol membatasi kemampuan Catalonia untuk menjadi sebuah bangsa dan menyatakan beberapa pasal dalam Statuta Otonomi Catalonia tahun 2006 tidak sesuai dengan konstitusi, yang kemudian menjadi dorongan baru untuk memisahkan diri dari Spanyol. Catalonia kemudian melakukan referendum kemerdekaan informal pada tahun 2014 dan 2017. Pada referendum kemerdekaan yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2017, lebih dari 90 persen masyarakat memilih “ya” untuk kemerdekaan Catalonia.¹⁰ Namun pemerintah Spanyol bersikeras bahwa referendum tersebut tidak legal. Hingga akhirnya parlemen regional Catalonia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 2017 dan Spanyol menanggapi dengan menanggukkan otonomi Catalonia dan memecat seluruh kabinet pemerintahan Catalonia.¹¹

⁹ Erin Blakemore, “Why Spain’s wealthiest region wants independence,” *National Geographic*, diakses pada 26 Januari 2020, <https://www.nationalgeographic.com/history/reference/people/why-catalonia-spain-wealthiest-region-independence/>.

¹⁰ Brennan Weiss, “Expert can’t figure out why independence movements are suddenly sweeping around the world,” *Business Insider Singapore*, diakses pada 25 Januari 2020, <https://www.businessinsider.sg/why-catalan-kurds-voting-independence-movements-secession-2017-10/?r=US&IR=T>.

¹¹ Erin Blakemore, *Op.cit.*

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini fokus kepada status otonomi yang diberikan kepada Catalonia pada tahun 1979 tidak menghentikan keinginan Catalonia untuk merdeka. Sehingga rentang waktu penelitian adalah dari tahun 1979 hingga 2017. Dalam rentang waktu tersebut terjadi dinamika yang menjadi perhatian penelitian ini. Dinamika tersebut adalah amandemen statuta otonomi Catalonia pada tahun 2006 yang kemudian ditolak oleh oposisi pemerintah Spanyol. Penolakan oposisi ini dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi. Dinamika ini kemudian memperkuat tuntutan Catalonia untuk melakukan referendum kemerdekaan. Hingga akhirnya referendum terjadi pada tahun 2017. Topik ini juga membahas permasalahan terkait hubungan internasional salah satunya mengenai kedaulatan.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Mengapa Catalonia menuntut kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 2017?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari dituliskannya penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa saja yang meningkatkan tuntutan kemerdekaan Catalonia dari Spanyol pada tahun 2017.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Bagi penulis pelaksanaan penelitian ini bisa dipergunakan untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai isu-isu yang terjadi di Eropa terkait dengan bidang politik dan keamanan. Khususnya mengenai isu kemerdekaan dan hak penentuan nasib sendiri yang menjadi tuntutan dari aktor *sub-state* kepada negara. Bagi pembaca yang memiliki minat dalam Hubungan Internasional di Eropa, Kajian Keamanan, dan Kajian Konflik dan Perdamaian, semoga hasil penelitian ini bisa dipertimbangkan untuk menjadi salah satu referensi.

1.4 Kajian Pustaka

Banyak literatur yang membahas mengenai hak penentuan nasib sendiri dan upaya kemerdekaan. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan tiga buah artikel yang ditulis oleh Charles King, David S. Siroky dan John Cuffe, dan José Luis Feito Higuera dan Ángel de la Fuente. Charles King dalam tulisannya yang berjudul *The Scottish Play: Edinburgh's Quest for Independence and the Future of Separatism* menuliskan bahwa gerakan kemerdekaan yang terjadi di Skotlandia tidak terjadi secara tiba-tiba. Namun, gerakan tersebut merupakan sebuah produk dari langkah yang diperhitungkan oleh elite politik dalam suatu institusi. Langkah-langkah yang diambil biasanya diawali dengan pernyataan sederhana mengenai undang-undang lokal harus lebih diutamakan dari pada yang dirancang oleh pemerintah pusat yang terletak jauh dari daerah mereka. Selanjutnya mereka akan mengajukan tuntutan radikal untuk mengendalikan

sumber daya alam setempat atau mengakhiri wajib militer di luar batas wilayahnya sendiri. Puncaknya ditandai dengan tuntutan pemisahan diri karena merasa tidak ada keuntungan yang sebanding bila tetap menjadi bagian dari negara terkait. Oleh karena itu, King berpendapat bahwa yang membangkitkan kembali gerakan kemerdekaan adalah adanya institusi seperti parlemen lokal, struktur administrasi dan kekuatan militer yang terpisah yang memungkinkan kelompok nasionalis untuk mengubah aspirasi menjadi sebuah tindakan politik. Dan usaha untuk memisahkan diri dijadikan sebagai sebuah strategi bagi partai regional yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat mereka. Strategi ini digunakan juga oleh Flandia di Belgia, Catalonia di Spanyol, Piemonte di Italia, dan Transilvania di Romania. Menurut King, Skotlandia menjadi panutan bagaimana kelompok separatis dapat menang dengan memahami institusi yang sudah berdiri.¹²

Sementara itu David S. Siroky dan John Cuffe melihat adanya perdebatan mengenai otonomi terkait resolusi konflik. Di satu sisi para ahli dan pembuat kebijakan meyakini bahwa otonomi dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan ketegangan dan masalah distribusi ulang di antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok lainnya. Namun penelitian lainnya menunjukkan bahwa otonomi dapat memperburuk hubungan antara negara dengan kelompok etnis karena otonomi memupuk kapasitas untuk tindakan kolektif dan pemerintah sendiri. Untuk membuktikan apakah kelompok etnik dengan kelembagaan otonom

¹² Charles King, "The Scottish Play: Edinburgh's Quest for Independence and the Future of Separatism." *Foreign Affairs* 91, no. 5 (2012): 113-124.

akan lebih rentan untuk memisahkan diri, Siroky dan Cuffe membuat tiga buah kategori, yaitu kelompok yang tidak pernah otonom, kelompok yang memiliki otonom, dan kelompok yang kehilangan status otonomnya. Dari hasil penelitiannya tersebut, Siroky dan Cuffe menemukan bahwa kelompok yang tidak pernah otonom tidak mungkin untuk melakukan mobilisasi karena mereka kekurangan kapasitas untuk melakukan tindakan kolektif. Sementara itu, kelompok yang sedang memiliki status otonom mungkin memiliki kapasitas tapi sering kali kekurangan motivasi. Kelompok yang kehilangan otonomi, dilihat oleh Siroky dan Cuffe, sering kali memiliki insentif kuat dan kapasitas untuk mengejar pemisahan diri yang memfasilitasi tindakan kolektif. Selain itu, pencabutan status otonomi melemahkan kemampuan pemerintah pusat untuk membuat komitmen yang kredibel di masa depan untuk memenuhi tuntutan.¹³

José Luis Feito Higuera dan Ángel de la Fuente dalam tulisannya yang berjudul *The Political Economy of Catalan Independence* melihat bahwa mayoritas masyarakat Catalonia mendukung kemerdekaan dari Spanyol karena adanya penindasan secara ekonomi dari Spanyol. Narasi ini dibentuk oleh koalisi politik yang mendominasi Catalonia semenjak tahun 2003 dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaan. Koalisi ini berhasil memegang kekuasaan karena mampu meyakinkan sebagian besar masyarakatnya dengan dua hal. Pertama, kondisi kehidupan Catalonia memburuk bukan karena krisis otonomi, tetapi karena penarikan sumber daya yang berlebihan untuk membayar kesejahteraan di

¹³ David S. Siroky dan John Cuffe, "Lost Autonomy, Nationalism and Separatism," *Comparative Political Studies*, 48 (2014), 3–34. doi:10.1177/0010414013516927.

seluruh Spanyol. Kedua, standar kehidupan masyarakat Catalonia akan meningkat dengan adanya kemerdekaan. Menurut mereka Madrid berutang kepada Catalonia sebesar 9 miliar euro. Klaim ini tidak benar karena pemerintah Catalonia tahu betul bahwa pasal statuta yang mewajibkan pemerintah pusat berinvestasi di Catalonia telah diamendemen oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga jumlah investasi bergantung pada anggaran nasional yang disetujui oleh parlemen Spanyol. Dengan begitu, pemerintah Catalonia memanipulasi opini publik dan berusaha mengobarkan semangat masyarakat Catalonia untuk berpikir bahwa Spanyol “merampok uang” yang seharusnya digunakan untuk investasi di Catalonia. Akibatnya, banyak masyarakat Catalonia yang percaya bahwa hanya bernegosiasi dengan alternatif kemerdekaan akan mendorong amandemen pasal-pasal Konstitusi atau hukum organik yang diperlukan untuk meningkatkan sumber daya fiskal yang tersedia untuk mereka.

Dari ketiga tulisan tersebut, dapat dilihat bahwa artikel pertama yang ditulis oleh Charles King fokus membahas bagaimana institusi lokal dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk mengajukan tuntutan dan usaha pemisahan diri merupakan sebuah strategi bila pemerintah daerah tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Sementara artikel yang kedua melihat bahwa otonomi dapat mengakibatkan usaha pemisahan diri apabila kelompok yang bersangkutan kehilangan otonominya. Artikel yang ketiga membahas mengenai upaya pemerintah Catalonia memanipulasi opini publik dengan narasi Catalonia ditindas secara ekonomi oleh Spanyol. Penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri fokus kepada bagaimana tidak adanya pengakuan sebagai identitas sebagai sebuah

bangsa mendorong Catalonia untuk menuntut kemerdekaan dan pemberian otonomi justru memperkuat identitas regional dan memunculkan faktor-faktor lainnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis dan memahami mengapa Catalonia masih menuntut kemerdekaan dari Spanyol, penulis menggunakan teori resolusi konflik dan konsep otonomi sebagai sumber konflik. Dalam bukunya yang berjudul *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*, Peter Wallensteen mendeskripsikan resolusi konflik sebagai situasi di mana pihak-pihak yang bertikai mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan ketidakcocokan di antara mereka. Ketidakcocokan dalam hal ini bermakna ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan dua pihak atau lebih pada saat yang sama dengan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya upaya mengadakan perjanjian berarti pihak-pihak yang berkonflik bertanggung jawab atas perjanjian, berkomitmen untuk implementasi dan legitimasi mereka. Dengan begitu, perjanjian berpeluang besar untuk bertahan meskipun menghadapi tantangan.¹⁴

Terdapat tujuh cara berbeda agar pihak-pihak terkait dapat hidup dengan atau menyelesaikan ketidakcocokan mereka. Pertama, satu pihak dapat mengubah

¹⁴ Peter Wallensteen, "Understanding Conflict Resolution," dalam *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System* (London: Sage Publications, 2002): 8.

tujuannya dengan mengubah prioritasnya. Kedua, kedua pihak tidak mengubah tujuan mereka tapi menemukan cara untuk dapat membagi sumber daya. Ketiga, *horse-trading*, yaitu di mana tuntutan satu pihak terpenuhi dalam satu isu sementara tuntutan pihak lain terpenuhi dalam isu lainnya. Keempat adalah dengan kontrol bersama. Kelima, dengan menyerahkan kontrol kepada orang lain sehingga pihak yang berkonflik sepakat untuk tidak mengatur sumber daya sendiri. Keenam, menggunakan mekanisme resolusi konflik seperti melalui arbitrase atau prosedur hukum lainnya yang diterima para pihak yang berkonflik. Ketujuh, masalah dibiarkan untuk dibahas nanti atau bahkan dilupakan.¹⁵

Cara yang pertama dapat terjadi ketika salah satu pihak dapat mengubah tujuan dengan menggeser prioritasnya dipengaruhi dengan adanya perubahan kepemimpinan. Kepemimpinan yang baru menjadi penting karena adanya perbedaan tujuan dan kebijakan dari pemimpin yang sebelumnya. Perubahan dunia juga menjadi penting karena akan memengaruhi perubahan prioritas strategis.¹⁶

Selain itu terdapat tiga buah pendekatan dalam resolusi konflik, yaitu dinamika konflik, akar konflik berdasarkan kebutuhan, dan perhitungan strategis rasional. Pendekatan konflik berdasarkan kebutuhan melihat bahwa untuk menyelesaikan suatu konflik perlu menyentuh isu-isu mendasar dalam konflik karena jika tidak maka perjanjian tidak akan bertahan lama. Isu-isu yang menjadi

¹⁵ Peter Wallensteen, "Approaching Conflict Resolution," dalam *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System* (London: Sage Publications, 2002): 54-57.

¹⁶ *Ibid*, hlm.54.

kebutuhan dasar individu atau kelompok di antara lain adalah terkait keamanan, identitas, pengakuan, dan partisipasi.¹⁷

Dalam konflik terkait teritorial, sering kali ditemukan adanya pengalaman diskriminasi. Individu dan kelompok-kelompok yang merasa bahwa haknya tidak dihargai oleh pemerintah pusat sehingga merasa tidak puas dan hal ini akan menimbulkan tindakan. Konflik etnis merupakan aplikasi dari frustrasi sosial karena adanya kebutuhan dasar tertentu yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar ini tidak selalu menyangkut material, tetapi juga hal-hal nonmaterial seperti kebudayaan.¹⁸ Eskalasi menjadi konflik kekerasan juga dapat terjadi karena salah satunya adalah dicabutnya otonomi kelompok tertentu sebab adanya penghapusan akses politik. Oleh karena itu, konflik kekerasan dapat diminimalkan atau diakhiri dengan adanya akses komunikasi politik terbuka di mana kelompok-kelompok dapat menyampaikan tuntutananya.

Dalam resolusi konflik, pemberian otonomi terhadap suatu wilayah juga dapat menyelesaikan konflik penentuan nasib sendiri. Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani *auto* (diri) dan *nomos* (hukum) yang memiliki arti hak untuk membuat hukum sendiri. Svante E. Cornell mendefinisikan otonomi sebagai suatu wilayah yang ditetapkan secara hukum dan diberikan status, hak-hak khusus, dan lembaga pemerintahan sendiri oleh suatu negara, berdasarkan

¹⁷ Peter Wallensteen, "Approaching Conflict Resolution," dalam *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System* (London: Sage Publications, 2002): 34-43.

¹⁸ Peter Wallensteen, "Conflict Resolution in State Formation Conflicts,," dalam *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System* (London: Sage Publications, 2002): 176-180.

perbedaan kelompok etnis yang berasal dari mayoritas populasi negara tersebut, tanpa melepaskan diri dari negara.¹⁹

Pemberian otonomi menjadi salah satu upaya resolusi konflik karena memberikan kemungkinan untuk berbagi kekuasaan legislatif dan eksekutif antara negara dan kelompok minoritas sembari melindungi kedua tujuan, yaitu hak dasar minoritas untuk menikmati penentuan nasib sendiri secara internal tanpa mengubah batas internasional dan integritas negara di mana mereka tinggal.²⁰

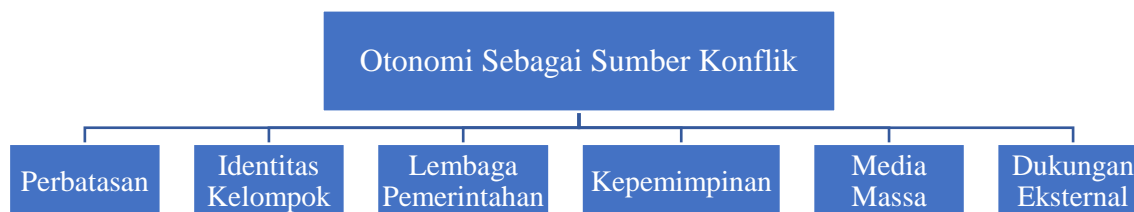
Namun dalam beberapa kasus, pemberian otonomi tidak selalu berhasil menyelesaikan konflik. Svante E. Cornell dalam artikelnya yang berjudul *Autonomy as a Source of Conflict: Caucasian Conflicts in Theoretical Perspective* melihat bahwa dengan adanya otonomi daerah, usaha untuk memisahkan diri mungkin untuk terjadi karena institusi ini melembagakan dan mempromosikan identitas kelompok secara terpisah sehingga meningkatkan hubungan yang erat, kesediaan kelompok untuk bertindak dan membangun lembaga politik untuk meningkatkan kapasitas kelompok untuk bertindak. Otonomi juga mempengaruhi enam hal, yaitu perbatasan, identitas kelompok, lembaga pemerintahan, kepemimpinan, media massa dan dukungan eksternal.²¹

¹⁹ Svante E. Cornell, "Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in the South Caucasus – Cases in Georgia," (PhD diss., Uppsala University, 2002).

²⁰ Thomas Benedikter, "What is political autonomy about? Fundamental features of political autonomy," dalam *Solving Ethnic Conflict through Self-Government: A Short Guide to Autonomy in South Asia and Europe* (Bolzano: EURAC Research, 2009): 8.

²¹ Svante E. Cornell, "Autonomy as a Source of Conflict: Caucasian Conflicts in Theoretical Perspective," *World Politics* 54 (2002): 245-276. doi:10.1353/wp.2002.0002.

Gambar 1.1 Diagram Teori Otonomi Sebagai Sumber Konflik



Sumber: Diagram diolah oleh penulis²²

Perbatasan merupakan karakteristik utama dari daerah otonom karena memiliki wilayah yang diakui dengan batas-batas yang jelas. Dalam hal ini peta dianggap penting untuk menjadi model proyeksi permukaan bumi dan penting bagi wilayah otonomi untuk mendukung klaim mereka atas daerahnya. Meskipun nama tempat, sungai, dan gunung akan lenyap, namun batas wilayah akan tetap ada. Peta sebuah wilayah dapat ditempatkan ke dalam poster, stempel resmi, kop surat, majalah, dan sampul buku sehingga mudah untuk dikenali dan akhirnya menjadi imajinasi yang membentuk lambang yang kuat bagi nasionalisme. Oleh karena itu, bagian ini melihat pentingnya bentuk wilayah, peta, dan perbatasan yang dianggap sebagai simbol yang signifikan bagi penduduknya.²³

Identitas kelompok merupakan hal kedua yang terpengaruh oleh otonomi karena wilayah otonomi berperan sangat penting dalam mempertahankan,

²² Svante E. Cornell, "Autonomy as a Source of Conflict: Caucasian Conflicts in Theoretical Perspective," *World Politics* 54 (2002): 245-276. doi:10.1353/wp.2002.0002.

²³ *Ibid*, hlm. 253.

mempromosikan, dan meningkatkan identitas serta hubungan yang erat di dalam kelompok. Instrumen utama dalam mempromosikan identitas etnis adalah dengan melalui sistem pendidikan. Sebab dengan memberikan informasi mengenai informasi identitas etnis mereka secara lebih awal dan sering dapat membuat individu merasa memiliki keterkaitan yang kuat dengan kelompok tersebut. Oleh karena itu, sekolah menjadi tempat untuk menanamkan identitas karena dapat mengajarkan budaya dan sejarah sekaligus menjadi tempat berinteraksi.²⁴

Hal berikutnya yang terpengaruh dengan pemberian otonomi adalah lembaga pemerintahan. Wilayah yang memiliki otonomi biasanya memiliki lembaga seperti negara yang dapat menjadi faktor penting dalam memobilisasi kelompok etnis. Dengan adanya otonomi, mereka memiliki pemerintah dan parlemen yang bertindak sebagai perwakilan sah dari etnis mereka dan menjadi badan yang memiliki tugas untuk pengambilan keputusan. Parlemen dapat mengesahkan undang-undang bahasa, menolak undang-undang dari pemerintah pusat, dan mengeluarkan deklarasi kedaulatan dan kemerdekaan. Dengan begitu, wilayah otonomi memiliki lembaga yang dapat menantang otoritas negara atau menentang kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh negara. Keberadaan pemerintah dan parlemen ini dapat meningkatkan rasa legitimasi dari tindakan yang diambil oleh wilayah otonomi dan struktur pengambilan keputusan sangat

²⁴ *Ibid*, hlm. 254.

penting untuk meningkatkan tuntutan etnopolitik dari tingkat ketidakpuasan terhadap suatu tindakan.²⁵

Dengan suatu daerah diberikan hak untuk memerintah wilayahnya sendiri berarti ada seorang individu yang memimpin pemerintahan tersebut. Pemimpin ini memiliki peran yang penting dalam setiap proses mobilisasi. Posisi kepemimpinan di daerah otonom memiliki basis yang kuat karena hak untuk memerintah wilayahnya menjadi legitimasi bagi para eksekutif untuk memfasilitasi peningkatan kohesi (keterkaitan) berbagai mobilisasi etno-politik dengan menyediakan satu lembaga di mana mereka dapat bersatu. Institusionalisasi juga memastikan bahwa perjuangan nasional dapat bertahan meskipun adanya pergantian kepemimpinan. Keberadaan struktur otonom dapat meningkatkan kemungkinan politisi untuk mempromosikan mobilisasi etnis untuk memajukan ambisi mereka sendiri. Karena lembaga otonom adalah sumber kekuatan untuk memimpin daerah, pemimpin memiliki kepentingan untuk meningkatkan tingkat pemerintahan di wilayah mereka sendiri dan kekuatan elite memiliki korelasi positif dengan tingkat otonominya. Oleh karena itu, elite memiliki kepentingan untuk mempertahankan sentimen nasionalis yang tinggi di masyarakatnya sehingga dapat memastikan tekanan dari bawah untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat otonomi.²⁶

Selanjutnya, otonomi juga dapat memengaruhi media massa karena otoritas pemerintah di daerah otonom sering kali mengendalikan media massa,

²⁵ *Ibid*, hlm. 254-255.

²⁶ *Ibid*, hlm.255.

seperti televisi, stasiun radio, dan koran. Oleh karena itu, otoritas tidak hanya dapat memengaruhi sikap populasi dalam jangka panjang melalui pendidikan, tetapi juga dapat memengaruhi populasi secara langsung melalui berita dan penggambaran peristiwa di media dan mempercepat proses mobilisasi etnis.²⁷

Terakhir adalah dukungan eksternal. Wilayah dengan otonomi memiliki posisi politik internasional yang lebih unggul dibandingkan dengan wilayah non-otonom karena otonom memiliki institusi dan pemberian otonomi memerlukan pengakuan oleh negara mengenai pelimpahan kedaulatan. Oleh karena itu, dukungan eksternal lebih mungkin untuk muncul untuk wilayah otonom karena terdapat institusi di mana dana dan jenis dukungan lainnya dapat disalurkan.²⁸

Berdasarkan paparan teori di atas, maka agenda penelitian akan dilakukan sebagai berikut: teori resolusi konflik akan digunakan pada bab kedua untuk mendeskripsikan bagaimana pemberian otonomi kepada Catalonia merupakan upaya resolusi konflik di antara Catalonia dan Spanyol. Sementara itu konsep otonomi sebagai sumber konflik yang dijelaskan oleh Svante E. Cornell akan dipakai di bab ketiga untuk mendeskripsikan bagaimana status otonomi yang diberikan kepada Catalonia memunculkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan tuntutan kemerdekaan.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 256.

1.6 Metode Penelitian

Dalam menganalisis faktor yang memengaruhi tuntutan Catalonia untuk merdeka, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian merupakan cara terstruktur untuk menguji sebuah teori dan dapat memperluas ruang lingkup teori yang digunakan.²⁹ Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan sebuah perilaku atau interaksi sosial.³⁰ Data yang dikumpulkan dari hasil metode penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar atau objek. Data visual yang digunakan dalam metode ini adalah gambar dan tabel untuk memudahkan pembaca untuk memahami ide-ide yang terkait. Studi kualitatif memberikan data yang bermakna³¹, menerjemahkan data atau membuat data menjadi lebih mudah dimengerti. Untuk dapat menginterpretasikan data kualitatif, penting untuk memahami makna sesuatu bagi orang-orang yang diteliti, sudut pandang orang-orang yang telah melakukan penelitian terhadap isu tersebut dan terakhir dari pembaca penelitian ini.³²

²⁹ Detlef F. Sprinz and Yael Wolinsky, "Introduction: Methodology in International Relations Research," dalam *Cases, Numbers, Models: International Relations Research Methods* (Los Angeles: UCLA, 2002): 10.

³⁰ Umar Suryadi Bakry, "Pertanyaan dan Desain Penelitian Hubungan Internasional," dalam *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015): 107-115.

³¹ Audie Klotz, "Introduction," dalam *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*, (New York: Palgrave MacMillan, 2008): 3.

³² Umar Suryadi Bakry (2015). *Op cit.*, hlm. 107-115.

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang berusaha mengeksplorasi untuk menjelaskan situasi, subjek, perilaku atau fenomena. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif maka penulis mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan menganalisis karakteristik sebagai upaya untuk mengumpulkan pengetahuan baru.³³

1.6.2 Pengumpulan Data

Selain itu penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumen dan internet untuk mempermudah penelitian ini. Dokumen adalah bahan yang menyediakan informasi tentang fenomena sosial tertentu yang keberadaannya secara independen dari tindakan peneliti.³⁴ Dalam menganalisis isu ini, penulis menggunakan dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer merupakan dokumen asli yang ditulis oleh individu yang memiliki akses langsung ke informasi yang diteliti atau langsung mengalami peristiwa tersebut.³⁵ Sementara dokumen sekunder adalah dokumen yang mengacu kepada dokumen primer atau menganalisis kepada dokumen primer.³⁶ Metode pengumpulan data yang kedua adalah berbasis internet untuk membantu penulis untuk mengakses artikel jurnal dan ilmiah yang terkait dengan penelitian.

³³ Robin Fireman Kramer, "An Overview of Descriptive Research." *Journal of the Association of Pediatric Oncology Nurses* 2, no. 2 (July 1985): 41–45. doi:10.1177/104345428500200208.

³⁴ Umar Suryadi Bakry, "Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Hubungan Internasional," dalam *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015): 171-173.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang mendeskripsikan status Catalonia sebagai sebuah wilayah otonomi di dalam negara Spanyol. Pembahasan diawali dengan resolusi konflik di antara Catalonia dan Spanyol menghasilkan Statuta Otonomi Catalonia pada tahun 1979 dan dibahas pula mengenai tidak terakomodasinya tuntutan Catalonia untuk diakui sebagai sebuah bangsa. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai amandemen SAC di tahun 2006 dan dinamika konflik di antara Catalonia dan Spanyol tahun 1979-2017.

Bab III berisikan deskripsi dan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini membahas bagaimana status otonomi yang dimiliki oleh Catalonia memunculkan enam buah faktor yang meningkatkan tuntutan kemerdekaan, yaitu perbatasan, identitas kelompok, lembaga pemerintahan, kepemimpinan, media massa, dan dukungan eksternal sesuai dengan konsep otonomi sebagai sumber konflik yang dipaparkan oleh Svante E. Cornell.

Bab IV berisikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.